

Jl. Stadion Nomor 01 Kota Sukabumi 43134

Telepon : (0266) 6225594

Laman : www.sukabumikota.bawaslu.go.id

Nomor : 63 /PM.00.02/K.JB-26/07/2023

13 Juli 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Himbauan

Yth.

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesai (KONI) Kota Sukabumi

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat,

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Edaran Bawaslu Nomor 27 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
12. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
13. Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tekhnis Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota; dan
14. Surat Forum Penegak Demokrasi Sukabumi kepada KPU Kota Sukabumi Tanggal 8 Juli 2023 yang ditembuskan ke Bawaslu Kota Sukabumi perihal Pengaduan terhadap salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Sukabumi atas nama Haickel Reza Belfas Dapil 2 Kota Sukabumi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d angka 4, Pasal 97 huruf b angka 3, dan Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pencalonan sampai dengan penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan tentang ketentuan/ Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam Pasal 240 Ayat 1 huruf (m) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan

yang salah satunya yaitu bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, agar memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tepatnya pada Pasal 12 Ayat (1) huruf 'b' angka '6' menyebutkan bahwa "Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, yang menyatakan bahwa 'mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai "kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara serta Pasal 14 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa :

- (1) Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf a) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.
- (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Bakal Calon harus menyerahkan:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat

pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

- (3) Bakal Calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT.
- (4) Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan penggantian calon.

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota sebagaimana diuraikan diatas. Serta berdasarkan Surat Forum Penegak Demokrasi Sukabumi kepada KPU Kota Sukabumi tanggal 08 Juli 2023 yang ditembuskan ke Bawaslu Kota Sukabumi perihal Pengaduan terhadap salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Sukabumi atas nama Haickel Reza Belfas Dapil 2 Kota Sukabumi, yang pada intinya menjelaskan informasi bahwa, sebagai berikut :

"Forum Penegak Demokrasi Sukabumi menyampaikan pengaduan kepada KPU Kota Sukabumi bahwa atas nama saudara Haickel Reza Belfas yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Sukabumi pada Dapil 2 Kota Sukabumi, yang bersangkutan juga menjabat selaku Ketua KONI Kota Sukabumi masa bakti 2023-2027. Maka dari itu yang bersangkutan harus mengikuti ketentuan sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) sampai dengan (4) PKPU Nomor 10 Tahun 2023, apabila tidak melengkapi sebagaimana ketentuan yang bersangkutan harus dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Merujuk pada ketentuan terhadap yang dimaksud "badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara", ialah Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, yang mana didalamnya memuat bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesai (KONI) tercantum dalam Daftar Unit Badan Lainnya.

Sekaitan dengan beberapa hal sebagaimana diuraikan diatas tersebut, sebagai upaya Bawaslu Kota Sukabumi dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu serta untuk melaksanakan tugas Pengawasan, maka dengan ini Bawaslu Kota Sukabumi menghimbau Komite Olahraga Nasional Indonesai (KONI) Kota Sukabumi, yaitu terhadap Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesai (KONI) Kota Sukabumi

yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Sukabumi, agar memperhatikan dan memenuhi sekaitan dengan ketentuan salahsatunya Surat pernyataan Bakal Calon yang menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, utamanya dalam "Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Harus dapat dipastikan bahwa Bakal Calon Anggggota DPRD Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud melalui Partai Politik Peserta Pemilu mampu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon. Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud belum diterbitkan, harus dapat dipastikan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan mampu menyerahkan surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, dan juga menyerhkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud, dengan memperhatiakn batas akhir penyampaian keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud diatas oleh Bakal Calon melalui Partai Politik kepada KPU Kota Sukabumi yaitu sebagaimana diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUHAMMAD AMINUDDIN

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip